

MENCARI SEBAB PELARIAN NARAPIDANA ANAK

Purnianti

Abstract

Prison escape has always been a problem everywhere since the first time prison institution had started housing inmates, including child escapee. There are several factors has been noted as causes behind prison escape; bad treatment given from the prison regime is one of them.

The writer emphasizes such sensitivity felt by child inmates against bad treatment and terrible facility and discussing how far these push children to run away of prison.

Key Words: anak, narapidana, pelarian, lembaga pemasyarakatan.

Pendahuluan

Penjara adalah suatu masyarakat tertutup, suatu institusi total. Apa yang terjadi di dalam dinding penjara tidak dengan mudah dapat dipelajari oleh orang luar dan apa yang terjadi di dalam sel seringkali tidak diketahui oleh petugas. Kehidupan narapidana dalam penjara diyakini sebagai suatu kehidupan yang keras, dimana narapidana sering kali menjadi korban. Kekerasan tersebut antara lain berupa gangguan dari sesama narapidana seperti pemerasan, penganiayaan, tindakan brutal, prasangka, stres, dan aneka ketegangan dalam kehidupan penjara.

Di dunia luar, narapidana adalah pelaku kejahatan, tetapi di dalam penjara sangat mungkin merekalah yang menjadi korban. Setiap narapidana hanya mempunyai alternatif yang terbatas. Mereka dapat menerima viktimisasi

dan berusaha melakukan yang terbaik dalam dunianya yang buruk. Beberapa alternatif yang mereka miliki antara lain; berjuang dengan tinju, kaki dan senjata yang barangkali dapat memenangkan imunitas kekerasan yang dilakukan sesama narapidana; mencoba untuk menjauhi narapidana lainnya (dimana pada umumnya memerlukan bantuan dari petugas), atau meminta pekerjaan khusus yang dapat memisahkan mereka dari populasinya; berusaha untuk melarikan diri; atau melaporkan narapidana lain yang menganiayanya ke petugas (dengan mengambil resiko mendapat pembalasan yang mematikan).

Seperti halnya masyarakat bebas, orang miskin melakukan kejahatan terhadap orang miskin, dan tetangga terhadap tetangga. Begitu pula dalam institusi penjara, narapidana membunuh narapidana, narapidana memperkosa nara-

pidana, narapidana yang berbadan kekar memeras barang-barang, jasa, dan memaksa berhubungan seks dengan narapidana yang muda dan lemah, narapidana yang berkelompok dan terorganisir (geng) merampas barang milik narapidana yang tidak memiliki kelompok. Seorang pelaku kejahatan yang mungkin ketika di luar penjara sangat dihormati oleh penjahat lainnya menjadi tidak berarti di dalam penjara. Hanya ada hukum rimba dan hukum *survival of the fittest* dalam penjara. Narapidana yang muda, naif, lemah, feminin atau penyendiri, bisa menjadi sasaran pemerasan, pemerkosaan, dan perbudakan (dipaksa untuk melayani narapidana yang lebih kuat atau yang memiliki status lebih tinggi).

Kekerasan-kekeraan yang terjadi ini adalah sebagai akibat dari ketidakmampuan dan/atau penolakan staf penjara untuk melindungi narapidana dari predator diantara narapidana itu sendiri atau juga penyalahgunaan otoritas yang dimiliki oleh staf penjara (MacNamara, 1983 : 219-233). Selain kekerasan antar narapidana, petugas juga melakukan kekerasan terhadap narapidana, seperti tidak memberikan pelayanan medis yang memadai, mengabaikan tanggung jawab jika narapidana mengalami cedera atau bahkan mati sebagai akibat kecelakaan kerja di tempat pelatihan kerja di penjara, membuat laporan palsu mengenai pelanggaran narapidana serta menggunakan kekerasan yang berlebihan untuk menunjukkan kewenangan dan mendisiplinkan narapidana (Lombardo, 1981).

Bentuk-bentuk kekerasan oleh petugas ini dapat terjadi karena narapidana dipandang sebagai obyek. Berkaitan dengan kesadaran bahwa narapidana adalah subyek maka di Indonesia sejak tahun 1964, diterapkan sistem pemasyarakatan sebagai pola perlakuan terhadap narapidana. Tujuan yang hendak dicapai oleh sistem pemasyarakatan adalah re-integrasi, yaitu pengembalian kesatuan hubungan hidup dan penghidupan antar narapidana dengan masyarakat luas. Narapidana sebagai manusia yang harus dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena kesalahannya, dalam gerak kehidupannya tidak boleh dipisahkan dari masyarakat dan diperlakukan semena-mena.

Dengan demikian, secara konseptual dan historis, sistem pemasyarakatan sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut oleh sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek serta dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa, demikian pula seyogyanya dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.

Walaupun akan selalu terdapat ketidaksempurnaan operasionalisasi program yang dijalankan, cukup menarik perhatian bahwa pada kurun waktu beberapa tahun ini banyak terjadi pelarian-pelarian yang dilakukan oleh para narapidana dari berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Diasumsikan, jika program pembinaan di lembaga pemasyarakatan berjalan seperti yang diharapkan, maka narapidana

dalam menjalani masa hukumannya akan lebih sabar dan tabah. Pada kenyataannya, terjadi pelarian yang dilakukan oleh para narapidana. Hal ini dimungkinkan karena ada sebab-sebab tertentu yang mendasari niat para narapidana untuk melakukan pelarian.

Sebab-sebab yang dapat menjadi latar belakang pelarian, diantaranya adalah, sebab-sebab internal dari para narapidana yang bersangkutan, seperti kondisi temperamental individual yang mungkin saja dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sub kulturalnya, kepribadian, pengaruh-pengaruh sosial budaya dan ekonomi, dan sebagainya. Sebab lainnya adalah, faktor kausa sistemik lembaga pemasyarakatan, seperti kondisi hubungan sosial antara petugas dan narapidana yang dikembangkan, kondisi fisik lembaga dan ketidak-efektifan program pembinaan itu sendiri.

LP Anak Pakjo Palembang

Pada tahun 1994, penulis pernah melakukan suatu penelitian di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Pakjo, Palembang Sumatera Selatan serta di LP Dewasa Palembang Sumatera Selatan. Dipilihnya LP Anak Pakjo, Palembang Sumatera Selatan ini sebagai obyek penelitian saat itu adalah sangat erat hubungannya dengan terjadinya pelarian narapidana di lembaga ini. Alasan dipilihnya pula LP Dewasa Palembang, Sumatra Selatan, didasari dua pertimbangan, yaitu:

1. Bahwa banyak kasus pelarian, baik dari LP Anak Pakjo, maupun lembaga pemasyarakatan lain di

lingkungan Sumatera Selatan, jika berhasil tertangkap kembali dikirim atau dipindah ke LP Dewasa Palembang ini.

2. Letak lokasi LP Dewasa Palembang ini berhadapan dengan LP Anak Pakjo, Palembang, sehingga diduga berita tentang pelarian narapidana dari LP Anak Pakjo, Palembang ini dengan cepat terdengar oleh penghuni lembaga ini.

Di LP Dewasa Palembang ini juga banyak ditemui bekas pelarian pada masa-masa yang lalu. Penelitian ini berusaha menjawab beberapa butir permasalahan, yaitu:

1. Adakah sebab-sebab internal individual yang mendukung dilakukannya pelarian oleh sejumlah narapidana anak? Jika ada maka sebab-sebab internal individual apa yang mendukung dilakukannya pelarian oleh sejumlah narapidana anak?
2. Adakah sebab-sebab yang berkaitan dengan faktor kausa sistemik LP yang ikut pula mendukung dilakukannya pelarian oleh sejumlah narapidana anak?

Faktor manakah, diantara keduanya, yang lebih dominan dalam mendukung dilakukannya pelarian oleh sejumlah narapidana anak?

Kondisi fisik Lapas

Kondisi fisik lembaga pemasyarakatan menjadi penting perannya bagi keberhasilan operasionalisasi ide dan program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Kepentingan aspek, fisik dari lembaga

pemasyarakatan yang ada ini akan menjadi lebih jelas jika dihadapkan pada kondisi bergesernya ide penjara ke ide pemasyarakatan.

Konsekuensi dari ide pemasyarakatan yang menitik-beratkan aspek pembinaan (disamping aspek hukuman), menuntut kondisi fisik lembaga pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan mendukung pelaksanaan program-program pembinaan, seperti pemberian kesempatan berkreasi, kesehatan yang baik, serta terciptanya suasana yang damai.

Memang tuntutan bagi aspek fisik ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti perombakan kamar, sel, blok yang lebih manusiawi, tersedianya ruang-ruang kreativitas seperti bengkel-bengkel kerja beserta perangkat dan fasilitas kerjanya, ruang kesehatan dan perawatan, sarana-sarana air bersih, kamar mandi, kakus, dapur dan sebagainya. Hambatan-hambatan biaya ini, walaupun dimaklumi oleh semua pihak sebagai penyebab ketidak-sempurnaan pemenuhan tuntutan fisik, ironisnya, selalu dijadikan *kambing hitam* bagi ketidakefektifan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan secara keseluruhan. Untuk memperjelas kondisi fisik lembaga pemasyarakatan dengan berbagai masalahnya, akan disajikan secara empiris kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo di Palembang, Sumatera Selatan.

Pada tahun 1993, ketika penelitian ini dilakukan, bentuk fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo di Palembang ini adalah bangunan tua yang terdiri dari tiga

blok yang saling berhadapan. Di antara blok-blok tersebut tidak terdapat taman pemisah seperti banyak dijumpai di lembaga pemasyarakatan di pulau Jawa.

Setiap blok terdiri dari banyak sel, yang setiap sel dihuni rata-rata dihuni oleh 7 hingga 12 narapidana. Kondisi yang demikian dapat dikatakan padat (*high density*) bagi sebuah lembaga pemasyarakatan.

Ruang-ruang lain, seperti bengkel kerja, ruang kesehatan, dapur, kamar mandi dan kakus, kondisinya sangat memprihatinkan. Secara umum, ruang-ruang tersebut sungguh tidak memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi yang melekat terhadapnya.

Air bersih merupakan masalah yang sangat mencolok dan mendesak untuk diantisipasi. Dari berbagai pengakuan responden, serta nara sumber yang ada, air bersih sangat sulit didapat di lingkungan LP. Tidak jarang penghuni lembaga mengambil air di got. Karenanya tidak mengherankan jika penyakit kulit dan perut sangat sering dijumpai di kalangan penghuni lembaga pemasyarakatan ini.

Hubungan narapidana dan petugas

Hubungan sosial yang baik dan akrab antara narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan juga sangat berperan dalam menciptakan iklim kehidupan sosial yang berdasarkan ide-ide pemasyarakatan. Hubungan yang demikian sesuai dengan hubungan sosial yang dikembangkan dalam pendekatan pembinaan (resosialisasi dan reintegrasi sosial) dan tidak

lagi berdasarkan pendekatan punitif semata.

Menurut berbagai penuturan responden serta observasi yang dilakukan peneliti pada tahun 1993, tampak bahwa hubungan sosial antara narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan ini kurang baik, kurang akrab dan terkesan kaku. Terdapat pula kecenderungan bahwa narapidana dihinggapi rasa takut jika berhubungan atau berbicara dengan para petugas serta kalapas.

Tindak kekerasan, seperti pemukulan, menurut pengakuan beberapa responden, juga sering dilakukan oleh petugas jika narapidana berbuat kesalahan. Pemukulan dilakukan dengan menggunakan alat, seperti tongkat, rotan dan sebagainya. Akibatnya, seperti dituturkan oleh salah satu responden, narapidana yang bersangkutan akan mengalami perlukaan hingga dua minggu lamanya.

Program pembinaan

Program Pembinaan yang dilakukan atau dilaksanakan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo maupun Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Palembang, dapat dikatakan jauh dari memadai. Bengkel kerja dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pembinaan ketrampilan dan kreativitas narapidana juga terlihat tidak menunjukkan aktivitas yang berarti.

Kegiatan kepramukaan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo, tampak tidak terealisasi dengan

baik. Bahkan, suatu hal yang sangat memprihatinkan bahwa kegiatan-kegiatan agama juga tidak berjalan dengan baik. Menurut penuturan para responden, khususnya yang beragama Islam, kegiatan keagamaan seperti shalat individual dan jumaton, sangat jarang dilakukan penghuni. Kendala yang paling menonjol adalah masalah air bersih. Menurut pengakuan mereka, kesulitan air bersih menyebabkan kesulitan mengambil air wudu.

Tabel 1
Persebaran Pendapat Responden Tentang Program Pembinaan Sebagai Bekal Mencari Pekerjaan

Kelompok	Program Pembinaan Sebagai Bekal Mencari Pekerjaan					Jumlah
	Memadai	Cukup Memadai	Kurang Memadai	Tidak Memadai	Tidak Tahu	
Anak	3	4	1	1	1	10
Dewasa	2	2	4	1	1	10
Jumlah	5	6	5	2	2	20

Sumber: Hasil Penelitian, 1993.

Tabel 2
Persebaran Pendapat Responden Tentang Pembinaan Mental Di Dalam Remaja

Kelompok	Pembinaan Mental			Jumlah
	Memadai	Tidak Memadai	Tidak Tahu	
Anak	1	8	1	10
Dewasa	5	5	-	10
Jumlah	6	13	1	20

Sumber: Hasil Penelitian, 1993.

Kendala lain, yang tergalil melalui wawancara dengan responden, bagi terealisasinya kegiatan-kegiatan ketrampilan dan kreativitas adalah "waktu keluar"-nya penghuni atau narapidana dari sel mereka. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Anak, "waktu keluar" narapidana adalah pukul 8.00 hingga 10.00. Sedangkan bagi narapidana dewasa waktu yang disediakan sedikit lebih panjang, yaitu dari pukul 9.00 hingga 13.00. Namun tidak jarang pula dalam satu hari, baik narapidana anak maupun dewasa, tidak dikeluarkan dari sel mereka atas dasar pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang diambil secara mendadak.

Pelayanan kesehatan juga kurang memadai. Dokter lembaga dapat dikatakan jarang datang. Obat-obatan pun sangat tidak memadai. Bubuk puyer dan salep adalah obat yang paling sering diberikan tanpa melihat penyakit narapidana yang bersangkutan. Dokter juga sering memberikan resep bagi obat-obatan yang dibutuhkan. Artinya, pengadaan obat melalui resep harus diusahakan sendiri oleh pihak penghuni (narapidana).

Secara umum, pembinaan fisik maupun mental oleh para responden dianggap tidak memadai. Bagi pembinaan fisik sebagai bekal mencari pekerjaan setelah menjalani hukuman, 5 orang responden menganggapnya kurang memadai. Sedangkan 2 orang responden lainnya menganggap pembinaan tersebut tidak memadai. Yang cukup mengherankan adalah, terdapat 5 orang responden dan 6 orang responden yang menganggap pembinaan fisik ini adalah memadai dan cukup memadai.

Pengalaman pelarian dan penyebabnya

Terdapat 2 (dua) orang responden narapidana anak dan 4 (empat) orang responden narapidana dewasa yang pernah melakukan pelarian. Menurut pengakuan seluruh responden, pelarian yang dilakukan bukanlah atas rencana dan inisiatif mereka. Mereka pada umumnya melakukan pelarian karena ikut-ikutan saja. Keikutsertaan mereka guna melarikan diri, terutama disebabkan

karena mereka berada dalam satu sel dengan *otak pelarian*. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara otomatis dan tidak berpikir panjang akan ikut serta dalam pelarian.

Beberapa sebab lain dikemukakan teman-teman lain yang melakukan pelarian, menurut pengakuan responden, antara lain adalah karena merasa terkekang, terlalu lama tidak keluar dari sel, rindu keluarga, dan takut pada sikap petugas yang kerap kali menghukum.

Satu hal lain yang terungkap tentang penyebab dilakukannya pelarian oleh responden adalah, ketakutan mereka menjadi *saksi* atas pelarian yang dilakukan teman-temannya. Dari berbagai pengalaman dan penuturan teman-teman mereka yang tidak terlibat dalam suatu peristiwa pelarian, orang-orang yang tidak ikut dalam pelarian akan diperiksa, diinterogasi dan dipaksa untuk membeberkan rencana dan tujuan pelarian. Walaupun tidak terlibat, dalam arti tidak ikut melarikan diri, mereka pada umumnya juga diperlakukan sebagai pelarian. Ketakutan lain apabila responden tidak ikut melarikan diri, akan di-*cap* tidak kompak, tidak punya solidaritas. Dan apabila orang-orang yang melakukan pelarian itu suatu hari tertangkap, mereka akan dituduh oleh orang-orang yang melakukan pelarian dan tertangkap tersebut sebagai orang yang *membocorkan* rencana dan tujuan pelarian.

Suatu hal yang juga cukup menarik untuk dikaji adalah bahwa hampir seluruh responden yang pernah ikut-ikutan melakukan

pelarian ini berada dalam suatu sel yang sangat padat.

Tabel 3
Pengalaman Pelarian Dan Kepadatan Sel Hunian

Kelompok	Pengalaman Pelarian dan Kepadatan Sel Hunian				Jumlah
	11 orang	12 orang	14 orang	19 orang	
Anak	1	1	-	-	2
Dewasa	-	1	1	2	4
Jumlah	1	2	1	2	6

Sumber: Hasil penelitian, 1993.

Pada sajian tabel di atas, tampak bahwa mereka yang melakukan pelarian adalah narapidana yang berada dalam suatu sel yang sangat padat. alasan keikutsertaan narapidana, yang sekedar ikut-ikutan tadi, tampaknya masuk akal. Dengan jumlah yang relatif banyak, suatu perbuatan kolektif yang spontan sangat mungkin terjadi. Namun dalam pengakuan yang lebih jauh lagi, tidak setiap usaha pelarian yang dilakukan oleh para narapidana dalam jumlah besar selalu berhasil. Banyak narapidana yang kemudian tertangkap kembali saat masih dalam lingkungan lembaga.

Suatu bukti lainnya bahwa pelarian itu dilakukan oleh banyak narapidana tanpa suatu rencana dan tujuan yang matang adalah kenyataan bahwa banyak pelarian yang tertangkap di sekitar lembaga, atau menyerahkan diri setelah sekian lama berada di hutan atau tempat-tempat keramaian.

Sanksi yang diberikan bagi narapidana yang melakukan pelarian, menurut pengakuan responden, adalah pemukulan. Seringkali narapidana yang tertangkap setelah melakukan pelarian dipukuli selama setengah jam sampai satu jam dengan berbagai alat, seperti rotan, bambu, besi beton, dan sebagainya.

Perlukaan yang cukup parah sering dialami oleh pelarian yang tertangkap. Bahkan ada seorang responden yang mengaku menderita patah kaki akibat dipukuli.

Analisis data

Dari data-data yang terkumpul, tampaknya bahwa sebab-sebab dilakukannya pelarian lebih didukung oleh sebab-sebab sistemik lembaga pemasyarakatan dibanding dengan sebab-sebab internal individual dari narapidana pelaku pelarian. Jika kita lihat sebab-sebab yang diduga datang dari internal individual, berdasarkan pada data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka kecil kemungkinan perbuatan pelarian ini terjadi karena dukungan faktor internal individual.

Pendidikan narapidana yang relatif rendah, keadaan sosial - ekonomi orang tua yang juga relatif rendah, lama waktu menjalani hukuman, dan sebagainya, ternyata tidak dapat dianggap sebagai sebab internal individual dari narapidana untuk melakukan pelarian. Khususnya dalam hal lamanya masa hukuman, responden berpendapat bahwa hal tersebut sudahlah wajar dan diterima sebagai konsekuensi perbuatan pidana mereka pada masa lalu. Satu-satunya sebab internal individual, jika memang dianggap demikian, sebagai pendukung dilakukannya pelarian oleh narapidana, adalah perasaan jenuh, bosan, takut atas *penyekapan dan perlakuan keras* dari petugas lembaga pemasyarakatan. Namun hal ini tentunya lebih berkaitan dengan apa yang dalam penelitian ini disebut faktor kausal sistemik

lembaga pemasyarakatan, yaitu menyangkut perlakuan petugas lembaga terhadap narapidana.

Faktor kausa sistemik lembaga pemasyarakatan yang diduga keras dapat menjadi faktor pendukung dilakukannya pelarian oleh sementara narapidana adalah sikap dan perlakuan petugas dan kondisi fisik lembaga yang tidak memadai sebagai tempat pembinaan.

Sikap dan perlakuan petugas yang dirasakan keras, terlebih lagi oleh narapidana anak, mungkin saja cerminan usaha lembaga pemasyarakatan untuk lebih mewujudkan ketertiban. Usaha penegakkan ketertiban yang berlebihan atau yang bersifat represif atau *punitif* tentunya sangat berkaitan dengan kecenderungan rendahnya ketaatan terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku.

Kalau ketaatan tidak berlangsung secara sukarela, maka peraturan hukum dapat diterapkan. Namun, ada kalanya, penerapan peraturan hukum dan pengawasan yang ketat tidak selalu menghasilkan hal-hal yang diharapkan. Pengawasan yang ketat terhadap berlakunya peraturan hukum mungkin mengakibatkan timbulnya sikap apatis dan menurunnya motivasi untuk berprestasi.

Terdapat asumsi, bahwa semakin banyak penggunaan peraturan hukum dan pengawasan yang ketat semakin besar kecenderungan menurunnya taraf produktivitas dari pihak yang dikenai peraturan hukum dan pengawasan tersebut. Kondisi yang menjelaskan asumsi itu antara lain karena apabila

pengawasan dilaksanakan maka pembatasan kebebasan lebih ketat. Pengawasan harus selalu mengawasi sikap dan tindakan manusia secara langsung, dan ada kemungkinan bahwa orang kemudian dianggap tidak dapat dipercayai atau kemampuannya rendah.

Ada kecenderungan, penerapan pengawasan yang ketat tersebut hubungan antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan bersifat konfliktual. Pertama-tama, masing-masing pihak kurang mempercayai pihak lain. Kedua, para narapidana biasanya diduga ingin melarikan diri atau berbuat onar sehingga para petugas lembaga pemasyarakatan harus mencegahnya. Ketiga, etik antara sesama narapidana guna mencegah adanya kerjasama dengan para petugas lembaga pemasyarakatan (Rushing, 1966).

Kecenderungan-kecenderungan tersebut, seperti pengawasan yang ketat, perlakuan yang keras dan bersifat menghukum, penurunan kesempatan produktivitas dan kreativitas sebagai akibat dari pengawasan dan perlakuan keras tersebut memang terjadi di dalam kedua Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo, Palembang. Kesempatan untuk keluar dari sel yang relatif pendek, bahkan seringkali untuk satu atau dua hari narapidana tidak diijinkan keluar, pemukulan-pemukulan oleh petugas yang sering terjadi, tidaklah mustahil mengakibatkan narapidana menjadi apatis, marah, dengki, jenuh dan sebagainya. Dihubungkan dengan

kemungkinan pemupukan produktivitas dan kreativitas narapidana, maka tidaklah mungkin terlaksana dengan dikurungnya narapidana dalam sel atau singkatnya waktu di luar sel.

Bagaimana dengan program pembinaan fisik atau ketrampilan dan pembinaan mental? Kondisi fisik lembaga yang tidak memadai sebagai tempat pembinaan juga turut memberikan sumbangan terhadap tidak jalannya program pembinaan, suatu hal yang secara tegas membedakan sistem penjara dan sistem pemasyarakatan. Kesulitan air bersih adalah salah satu contoh kondisi fisik lembaga yang tidak memadai dan tidak manusiawi, sehingga air yang ada tidak layak untuk digunakan sebagai air wudu, adalah salah satu hal yang kontradiktif dengan program pembinaan mental : *narapidana mengaku tidak bisa shalat karena air kotor.*

Dengan tidak berjalannya program pembinaan sebagai salah satu karakteristik sistem pemasyarakatan ini, maka menggugurkan asumsi bahwa *narapidana akan lebih sabar, tabah, tenteram dan "kerasan" dalam menjalankan masa hukumannya.* Dengan demikian, usaha-usaha pelarian bukanlah hal yang mengherankan lagi bila terjadi suatu kali. Dengan kata lain, faktor kausa sistemik lembaga pemasyarakatan dapat mendukung pelarian narapidana.

Penutup

Dari penelitian di LP Anak Pakjo Palembang, ini terungkap bahwa memang terjadi kekerasan di

balik tembok lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas. Kekerasan-kekeraan fisik dan bentuk kekerasan lainnya tersebut memiliki dampak psikologis terhadap narapidana seperti munculnya sikap apatis, marah, dengki, jenuh dan sebagainya. Untuk menghadapi dunianya yang demikian buruk, narapidana memiliki alternatif pilihan yang terbatas dimana salah satu pilihannya adalah melarikan diri. Hal ini menjawab pertanyaan jika semua narapidana mengalami kehidupan yang sama mengapa ada narapidana yang melarikan diri dan ada yang tidak.

Meskipun jumlah narapidana yang melarikan diri tidak banyak, tetapi dari jumlah yang sedikit ini diperoleh gambaran bahwa salah satu alasannya melarikan diri adalah karena terjadinya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan yang sistemik sifatnya selain kekerasan fisik; seperti misalnya pematian kreativitas dan produktivitas, pengabaian kesehatan, pengabaian pembinaan mental dan lainnya yang sebenarnya dapat dihindari dengan memperbaiki sistem yang ada. Adanya narapidana yang melarikan diri sesungguhnya adalah merupakan cerminan dari kegagalan suatu sistem lembaga pemasyarakatan.

Dengan memandang narapidana sebagai subyek pembinaan dan bukannya obyek, seharusnya, tidak terjadi kekerasan-kekeraan yang berlebihan karena narapidana akan menyadari bahwa dirinya sedang dibina dan dipersiapkan untuk dapat kembali ke masyarakat. Jadi, meskipun secara ideal sistem pemasyarakatan sangatlah berbeda

dengan apa yang berlaku di dalam sistem kepenjaraan, namun dalam prakteknya hampir tidak berbeda.

Penelitian ini memang tidak mencari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi sesama narapidana secara mendalam tetapi kekerasan tersebut ada, yaitu dengan terungkapnya alasan ikut melarikan diri karena takut menjadi saksi, takut dianggap tidak solider, dan takut dituduh membocorkan rencana pelarian tersebut jika narapidana yang melarikan diri kelak tertangkap. Karena itulah kadangkala, bagi orang luar, pelarian narapidana yang masa hukumannya tidak lama lagi habis kadangkala dianggap tidak masuk akal.

Dari pengungkapan alasan ini dapat diperoleh gambaran bahwa pilihan untuk melarikan diri bukanlah pilihan yang sederhana. Kadangkala, melarikan diri bagi narapidana menjadi satu-satunya pilihan yang masuk akal daripada menanggung resiko menghabiskan sisa masa hukumannya.

Daftar Pustaka

- Departemen Kehakiman RI
1990 **Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan**, Jakarta: Pengayoman.
- Lombardo, L.
1981 **Guards Imprisoned: Correctional Officers at Work** New York: Elsevier.
- MacNamara, Donald E.J. and Andrew Karmen (eds.)
1983 **Deviants: victims or victimizers?**, Beverly Hills:

Sage Publications.

- Rushing, William A.
1990 "Organizational Rules and Surveillance: Proportions in Comparative Organizational Analysis", dalam **Administrative Science Quarterly**, Vol. 10, IV.

- UNAFEI dan Babinkumnas, Departemen Kehakiman RI
1984 "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum," seminar, Jakarta.

KEMISKINAN, KEBIJAKAN NEGARA DAN KENAKALAN ANAK

Iqrak Sulhin

Abstract

Problem of poor children should not stop at the point where children's family can be blamed from being poor. The writer argues that the state has to take responsibility due to its duty to provide welfare to society. However, in reality, the writer also argues there are many government's policies which contradict and do not really reflect the best interest of children.

It is the writer's intention to see the state provides more pro-children policy so as to be in line with what the state has positioned children as the next generation of society.

Key Words: kenakalan, anak, negara, kebijakan negara.

Pendahuluan

Anak memiliki hak yang lebih banyak daripada kewajibannya. Ini merupakan konsekuensi statusnya yang mengharuskan semua pihak untuk memberikan perhatian serius terhadap perkembangan anak. Mulai dari perhatian terhadap kesehatan, kecukupan gizi dan pengobatan yang memadai hingga perhatian terhadap perkembangan emosi dan intelegensinya. Perhatian ini bahkan sudah harus diberikan semenjak anak berada dalam kandungan.

Orang tua merupakan pihak yang pertama sekali bertanggung jawab atas perkembangan anak. Merekalah yang pertama sekali memberikan kasih sayang, jaminan kesehatan dan pendidikan kepada

anak. Oleh karenanya, kondisi sosial ekonomi dari orang tua menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam menentukan apakah kesehatan, emosi dan intelegensi anak akan berkembang dengan baik atau tidak.

Kesulitan ekonomi mengakibatkan keluarga sulit memberikan prioritas utama bagi kepentingan anak. Kondisi ini kemudian mengakibatkan munculnya beberapa masalah dalam perkembangan anak. Seperti, penyakit yang mematikan, kekurangan gizi, rendahnya tingkat kecerdasan anak hingga munculnya fenomena anak jalanan dan delinkuensi anak (*juvenile delinquency*).